

Rancangan Arah Pengembangan Wilayah Tahun 2024

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
Kementerian PPN/Bappenas

- 1** Pendahuluan
- 2** Capaian evaluasi pengembangan wilayah
- 3** Arah Kebijakan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2024
- 4** Highlight Kebijakan Pembangunan Wilayah

Outline Paparan

'01

Pendahuluan: Tantangan dan Identifikasi Isu

Identifikasi Isu- Isu Global, Nasional dan Lokal



Isu Global

- Stabilitas politik global (perang Ukraina - Rusia)
- Pasokan Pangan dan Energi
- Resesi
- Inflasi
- Investasi melambat
- Perubahan iklim



Isu Nasional

- Efek Resesi global
- Inflasi
- Daya Beli
- Tahun politik



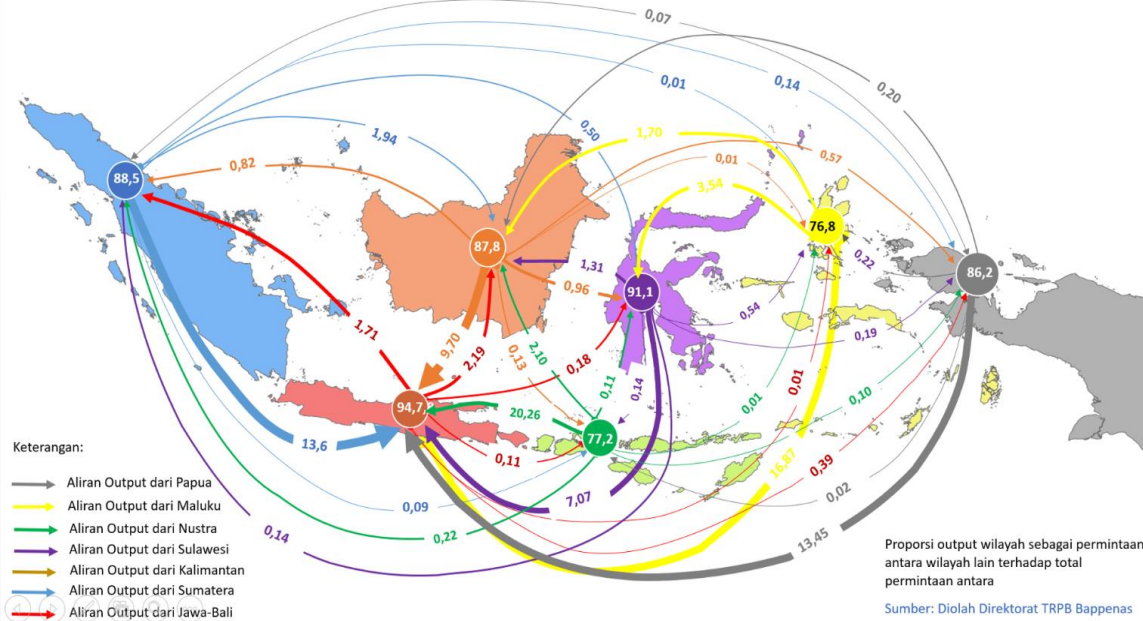
Isu Lokal

- Bencana dan Daya dukung Lingkungan
- Pemantapan Pemulihan Ekonomi
- Daya beli
- Pengangguran
- Pemerataan
- Kemiskinan
- *Stunting*
- Kualitas Sumber Daya Manusia

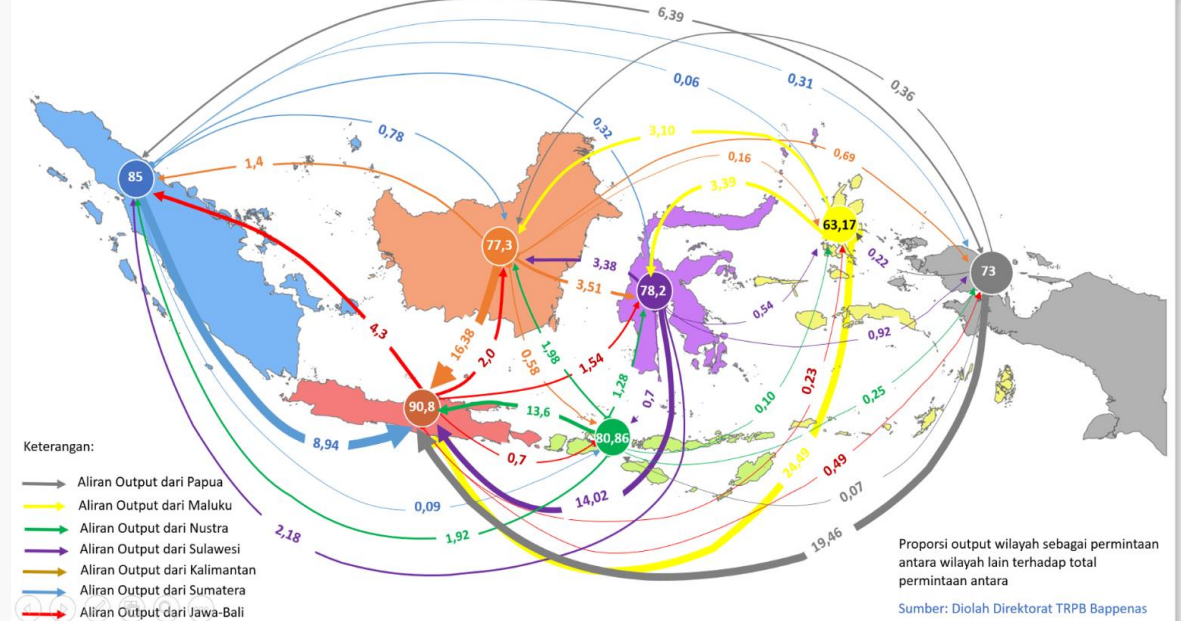


Identifikasi Keterkaitan Ekonomi Domestik

Pola Spasial Aliran Output (Permintaan Antara) antarpulau (persen) IRIO 2010



Pola Spasial Aliran Output (Permintaan Antara) antarpulau (persen) IRIO 2016



- **Pola keterkaitan antar wilayah relatif sama**, dimana Jawa-Bali masih mendominasi perdagangan antar wilayah
- **Ada penguatan perdagangan antarwilayah** yang ditunjukkan dengan meningkatnya volume perdagangan antar wilayah
- Implikasi kebijakan adalah **penguatan konektivitas dan sistem logistik antarwilayah semakin dibutuhkan** untuk memperkuat integrasi perekonomian wilayah.





Tantangan di Tahun 2024



Safe-guarding penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020-2024.



Tahun 2024 merupakan **tahun politik**, agenda Pemilu dan masa transisi



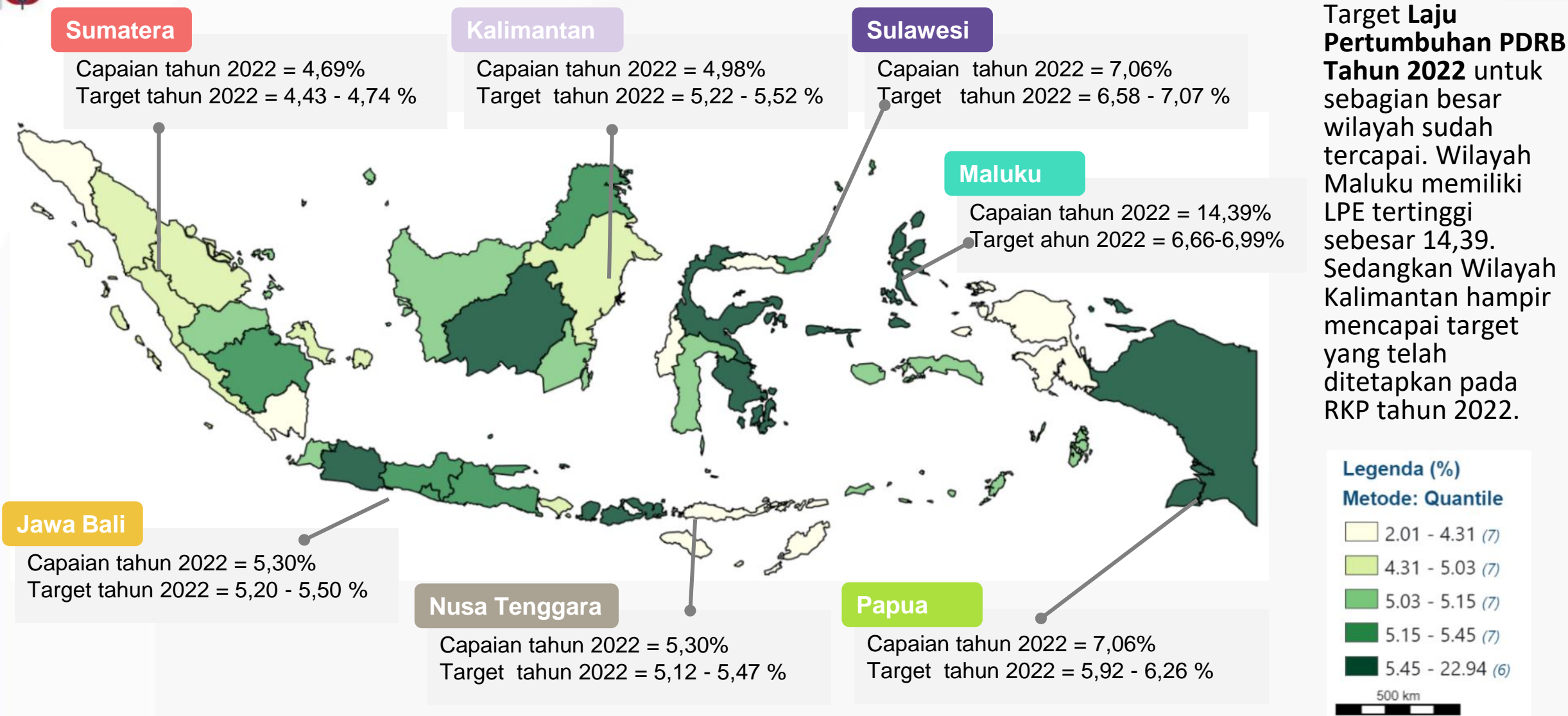
Tahun 2024 menjadi landasan awal untuk **penyusunan RPJMN 2025-2029**



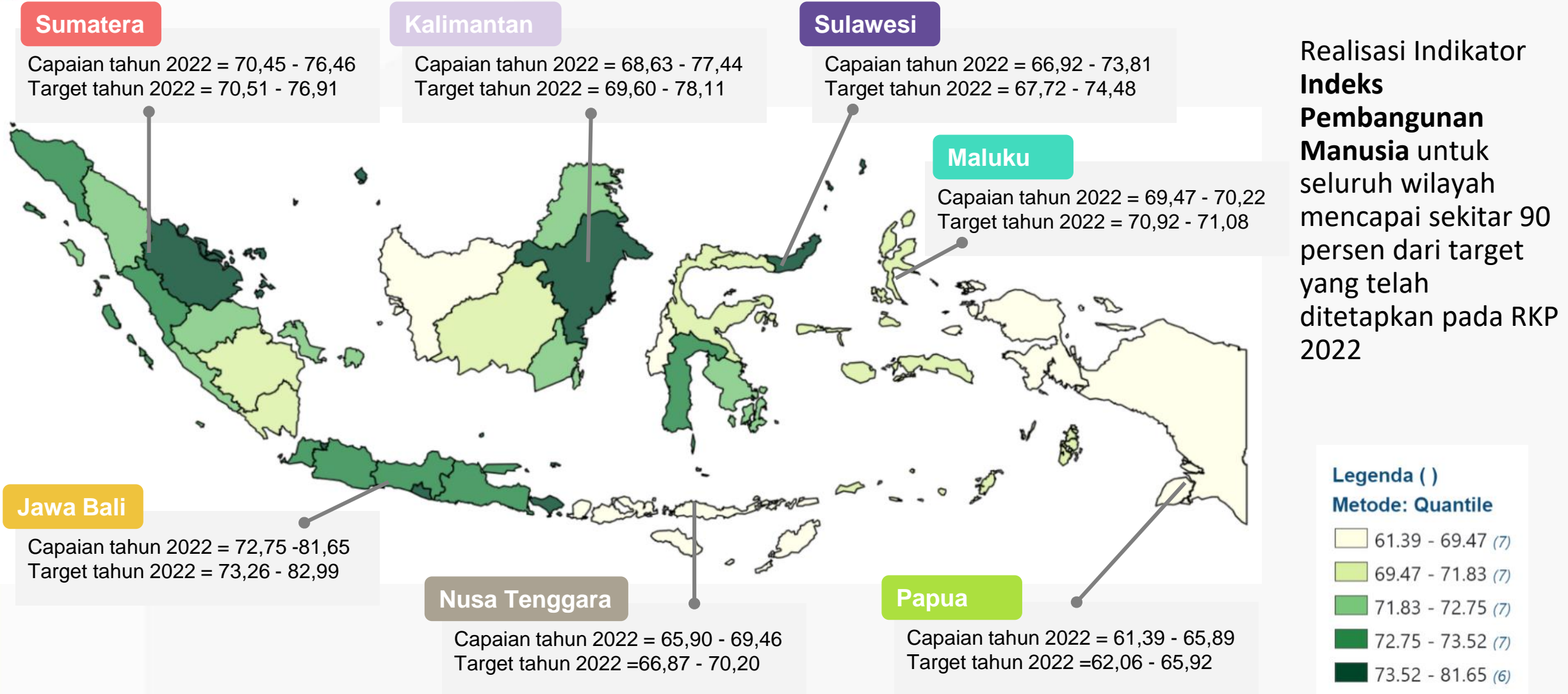
'02

Capaian Evaluasi Pengembangan Wilayah

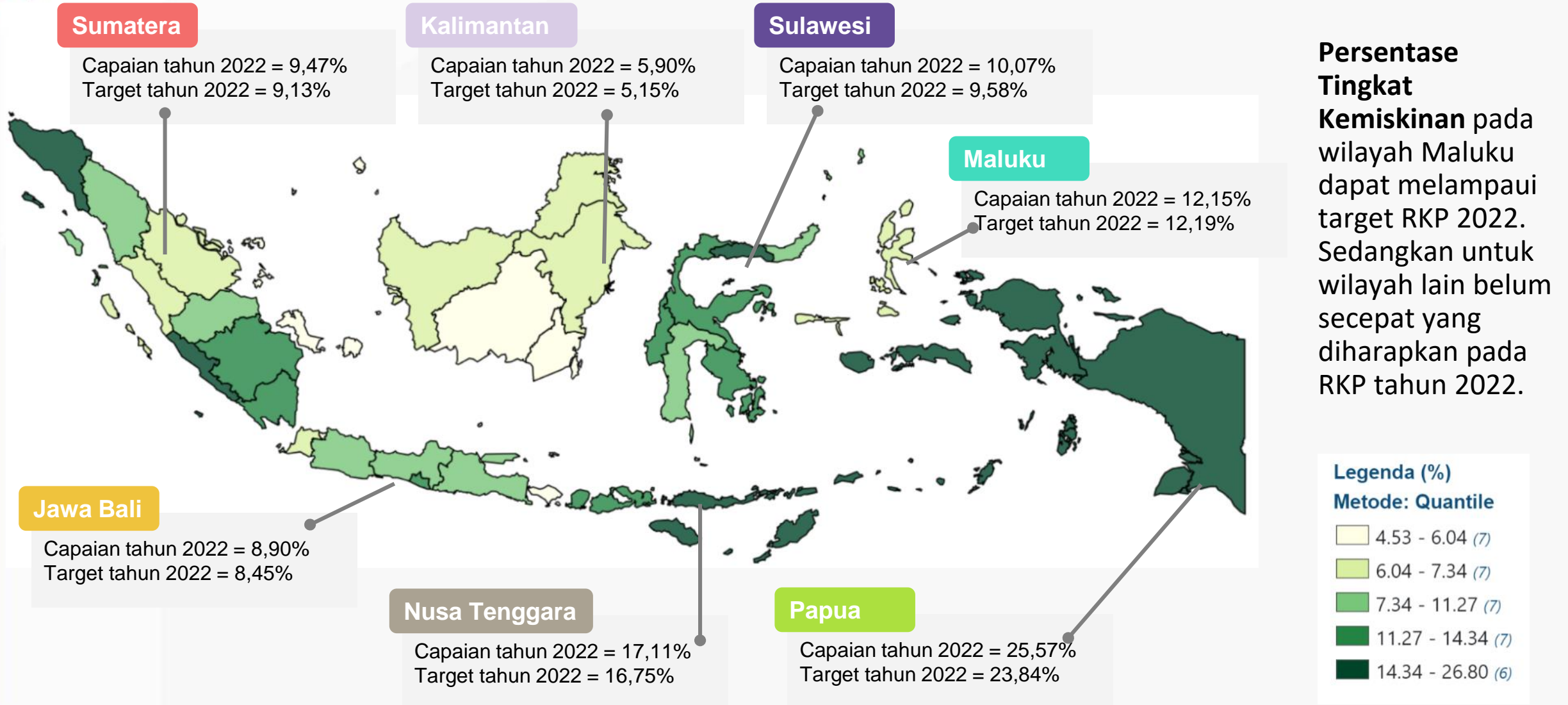
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Per Wilayah Pulau dan per Provinsi



Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 Per Wilayah dan per Provinsi



Capaian Persentase Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 Per Wilayah dan per Provinsi



'03

Arah Kebijakan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2020 -2024

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk **Menyelesaikan Isu Ketimpangan Antarwilayah**

Sasaran

1. Meningkatkan **pemerataan antarwilayah** (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat **pertumbuhan wilayah**
3. Meningkatkan **kualitas** dan akses **pelayanan dasar**, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatkan **sinergi pemanfaatan ruang wilayah**

Mendorong **transformasi dan akselerasi pembangunan** wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera

Target, Major Project, dan Proyek Prioritas di 7 Wilayah Pembangunan

Strategi dan Pendekatan Pengembangan Wilayah

Koridor Pertumbuhan

Memacu **pertumbuhan ekonomi nasional** melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan

Koridor Pemerataan

Meningkatkan **pelayanan dasar yang lebih merata** melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas terutama kabupaten/kota dalam koridor pemerataan





Keunggulan Wilayah RPJMN 2020 -2024

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan Keunggulannya

WILAYAH JAWA - BALI

- **Industrialisasi** berbasis **pasar**, memproduksi **barang konsumsi**, memanfaatkan keunggulan aglomerasi
- **Simpul pengolahan** dalam rantai nilai domestik antarwilayah
- Berpartisipasi dalam **Global Value Chains**
- **Pusat jasa** modern nasional
- Pintu gerbang internasional **pariwisata nasional**
- **Lumbung pangan** nasional

WILAYAH SUMATERA & KALIMANTAN

- **Industrialisasi** berbasis **sumber daya alam**, memanfaatkan keunggulan **komoditas perkebunan dan pertambangan**
- Hilirisasi untuk penciptaan nilai tambah
- Diversifikasi sektor ekonomi
- **Lumbung energi** nasional
- **Lumbung pangan** nasional
- Pengembangan **pariwisata** potensial **berbasis alam dan budaya**

WILAYAH NUSA TENGGARA, MALUKU, DAN PAPUA

- Industrialisasi berbasis sumber daya alam yang perlu mendekati bahan baku (**industri berbasis pertambangan**)
- Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
- Diversifikasi sektor ekonomi dan pengembangan ekonomi lokal
- Pengembangan **pariwisata** potensial **berbasis alam dan budaya**

Rancangan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah 2024



Percepatan pemulihan **transformasi sosial dan ekonomi**



Memperkuat **integrasi perekonomian domestik** dan Meningkatkan **kualitas pelayanan dasar** untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah



Penguatan **rantai produksi** dan **rantai nilai** di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah



Meningkatkan **sinergi pemanfaatan ruang wilayah**



STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti **KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi**, serta **Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)** perbatasan negara
2. Strategi pemerataan dengan **mempercepat penyediaan pelayanan dasar** di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan kawasan rawan bencana



SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Mempercepat **pemulihan kondisi sosial ekonomi** masyarakat dan daerah
2. Mendorong **percepatan pertumbuhan** dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali
3. Meningkatkan **pemerataan pembangunan** antarwilayah

Sasaran Pembangunan Wilayah Tahun 2024

Sumatera

LPE = 4,6 - 5,0 %
IPM = 71,23 - 77,23
Tingkat Kemiskinan = 7,50 - 8,30 %

Kalimantan

LPE = 5,2 - 5,6 %
IPM = 69,19 - 78,80
Tingkat Kemiskinan = 4,00 - 4,50 %

Sulawesi

LPE = 7,7 - 8,6 %
IPM = 67,84 - 74,71
Tingkat Kemiskinan = 7,80 - 8,50 %

Maluku

LPE = 12,6 - 16,8 %
IPM = 70,06 - 70,97
Tingkat Kemiskinan = 9,50-10,00 %

Jawa Bali

LPE = 5,2 - 5,5 %
IPM = 73,56 - 82,57
Tingkat Kemiskinan = 7,00 - 7,50 %

Papua

LPE = 5,8 - 7,2 %
IPM = 62,46 - 67,04
Tingkat Kemiskinan = 22,50 - 23,00 %

Nusa Tenggara

LPE = 5,7 - 6,1 %
IPM = 66,58 - 70,56
Tingkat Kemiskinan = 14,50 - 15,00 %

Sumber: Exercise terbaru Kementerian PPN/Bappenas

- Sasaran LPE 2024 merupakan hasil exercise Dit. PMAS per 13 Februari 2023
- Sasaran IPM 2024 merupakan hasil exercise Dit. KGM per 16 Februari 2023
- Sasaran tingkat kemiskinan 2024 merupakan hasil exercise Dit. PKPM per 22 Februari 2023

'04

***Highlight* Kebijakan
Pembangunan Wilayah**

Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Strategi

Pembangunan gedung pemerintahan dan hunian*

- Istana Presiden
- Istana Wakil Presiden
- Kantor Kementerian Koordinator
- Hunian ASN dan TNI/POLRI

Strategi

Pembangunan infrastruktur utama*

- Jalan Tol IKN
- Jalan sumbu kebangsaan
- Jaringan distribusi SPAM
- Jaringan perpipaan air limbah

Indikator

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara

Target: 3.399 Ha (dalam KIPP 6.671 Ha), yang didukung oleh:

- Pembangunan **Kawasan Istana Presiden** target 2024 sebesar 100%
- Pembangunan **Kantor Kementerian Koordinator** target 2024 sebesar 100%
- Pembangunan **Hunian ASN dan Hankam** target 2024 sebesar 100%

*rincian dalam proses koordinasi dengan K/L

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN



Mempercepat pertumbuhan wilayah melalui **diversifikasi kegiatan ekonomi**



Memantapkan peran sebagai **lumbung energi nasional**



Mempertahankan peran Kalimantan sebagai **paru-paru dunia**



Mendorong **pemerataan pembangunan**, terutama di Kalimantan Bagian Utara

STRATEGI PERTUMBUHAN

- 1 Membangun **IKN dan infrastruktur pendukungnya**.
- 2 Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan **kawasan-kawasan strategis**.
- 3 Mengembangkan **komoditas unggulan wilayah, yaitu karet, kelapa, lada, kopi, kakao dan perikanan** dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya.
- 4 Mengembangkan **kawasan perkotaan** termasuk WM Banjarmasin, sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan strategis di sekitarnya.
- 5 Mengembangkan **sentra produksi pangan (food estate)** dengan didukung **korporasi petani**.
- 6 Meningkatkan **pelayanan perizinan investasi** dan memperkuat **forum kerja sama** pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi pusat-daerah regional Wilayah Kalimantan.
- 7 Meningkatkan **kepastian hukum hak atas tanah** melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.
- 8 Mempercepat proses **penyusunan dan penetapan rencana tata ruang** baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

STRATEGI PEMERATAAN

- 1 Memperkuat konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan **infrastruktur multimoda transportasi dengan jaringan jalan Trans Kalimantan**.
- 2 Mengembangkan **kota-kota sedang** sebagai pusat pelayanan dan basis pengembangan ekonomi lokal.
- 3 Mengembangkan **ekonomi kawasan perbatasan** khususnya PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midang, PKSN Nunukan, dan PKSN Long Nawang untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara.
- 4 Memperluas **cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM** terutama di wilayah 3T khususnya pada bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas.
- 5 Meningkatkan **tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa** dalam hal kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
- 6 Mengoptimalkan **fungsi dan peran GWPP** dalam rangka penguatan sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi.
- 7 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya di daerah 3T terhadap **pelayanan pendidikan, kesehatan, dan balai-balai latihan kerja**.
- 8 Meningkatkan upaya **pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan** serta ketanggungan terhadap ancaman bencana alam.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN



Mempercepat **pembangunan kesejahteraan** dengan pendekatan **berbasis tujuh wilayah** adat yaitu Laa Pago, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay melalui penyediaan pelayanan dasar serta perluasan akses di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua



Memfasilitasi transformasi perekonomian wilayah khususnya melalui **hilirisasi komoditas unggulan pertanian**



Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus berlandaskan pendekatan budaya dan kondisi sosio-ekologis Wilayah Papua



Memperkuat kerja sama dan kemitraan antardaerah melalui pendekatan berbasis wilayah adat



Mengoptimalkan sistem nilai dan norma dalam wilayah adat untuk memfasilitasi aktivitas sosial ekonomi serta pergerakan penduduk dan barang



Memperkuat peran distrik sebagai pusat data informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan daerah.

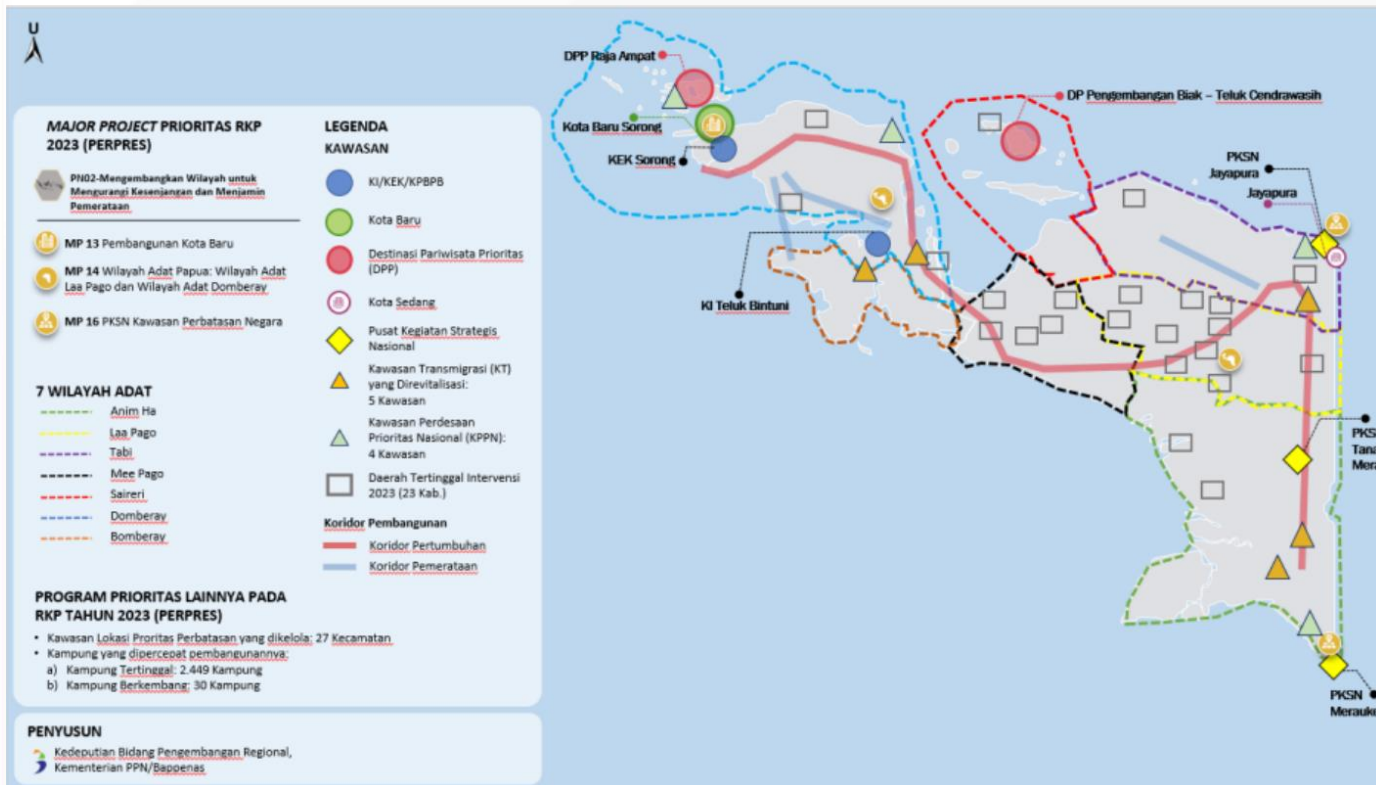
STRATEGI PERTUMBUHAN

1. **Melanjutkan pembangunan jaringan infrastruktur** yang terintegrasi antara pusat-pusat produksi rakyat dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, seperti **KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni**, dengan terus mendorong percepatan operasionalisasi kawasan, realisasi investasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah.
2. **Mempercepat pengembangan kawasan perkotaan pada kawasan yang potensial untuk dikembangkan**, termasuk pembangunan Kota Baru Sorong dan kota-kota kecil yang ditujukan sebagai penggerak ekonomi wilayah serta pusat pelayanan dasar dan ekonomi dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum dan sanitasi, drainase, serta pengelolaan sampah dan limbah yang aman.
3. **Mendorong produktivitas komoditas unggulan** pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan seperti sagu, kopi, kakao, pala, kenaf, sapi, dan perikanan tangkap dalam rangka penyiapan basis industri manufaktur dan industri jasa.
4. **Mendorong ekonomi kemaritiman di DPP Raja Ampat dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih** dengan mempercepat pengembangan sentra kelautan perikanan terpadu dan pariwisata bahari.
5. **Mempercepat pengembangan kapasitas dan keterampilan hidup pemuda Papua** untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan sumber daya manusia, kewirausahaan, pelatihan vokasi, pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center), serta pengembangan kreativitas dan inovasi pemuda asli Papua.
6. Meningkatkan **pelayanan perizinan investasi** dan memperkuat **forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi** di daerah, serta **penataan regulasi** daerah dan **harmonisasi regulasi** pusat-daerah regional Wilayah Papua.
7. Meningkatkan **kepastian hukum hak atas tanah adat/ulayat** melalui pemberian sertipikat hak atas tanah, serta peningkatan daya dukung lingkungan dan kawasan konservasi untuk pembangunan rendah karbon.
8. **Mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang** baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah

STRATEGI PEMERATAAN

1. **Mengembangkan potensi lokal** pada setiap wilayah adat untuk membuka lapangan pekerjaan dalam rangka menyiapkan Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.
2. **Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM terutama di lokasi afirmatif** seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan memperluas cakupan dan kualitas pelayanan dasar, serta terus melakukan kebijakan pengembangan sekolah terpadu berpola asrama, *flying healthcare*, dan *telemedicine* untuk menjangkau pelayanan penduduk di daerah pegunungan dan terpencil serta khususnya di bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas.
3. **Mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta kawasan perbatasan** termasuk kampung dengan pendekatan pembangunan berbasis wilayah adat dan distrik.
4. **Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah dan kampung** (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) khususnya dalam hal kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
5. **Mengoptimalkan, fungsi dan peran GWPP** dalam rangka sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.
6. **Mengoptimalkan perencanaan, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua berbasis kinerja** untuk mewujudkan perbaikan pelayanan

Rancangan Fokus Kegiatan dan Lokasi Prioritas Papua



- **Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan pada KI Teluk Bintuni, fasilitasi KEK Sorong, dan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Tetuk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;
- **Pengembangan Sektor Unggulan** akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu, kopi, kakao, pala dan perikanan budidaya melalui pemberian sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN
- **Pengembangan Kawasan Perkotaan** yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru (Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura).
- **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi** yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN, 27 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara, revitalisasi 5 kawasan transmigrasi, pengembangan 4 KPPN, percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri, 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023.
- **Kelembagaan dan Keuangan Daerah** yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah, kualitas dan kompetensi SDM ASN, penguatan GWPP, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan dokumen Perencanaan

Terima Kasih

Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas

LAMPIRAN

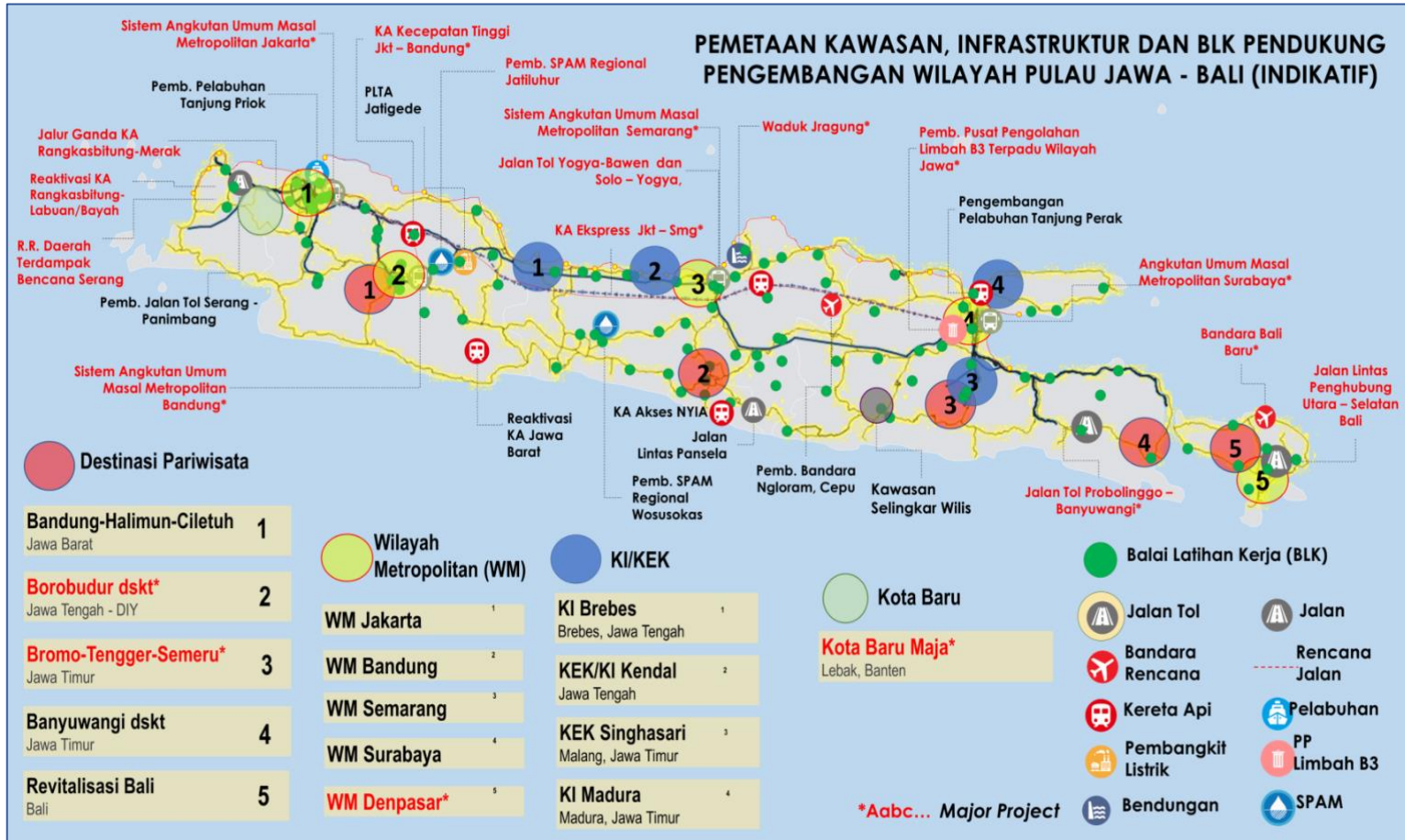
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Per Pulau

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera



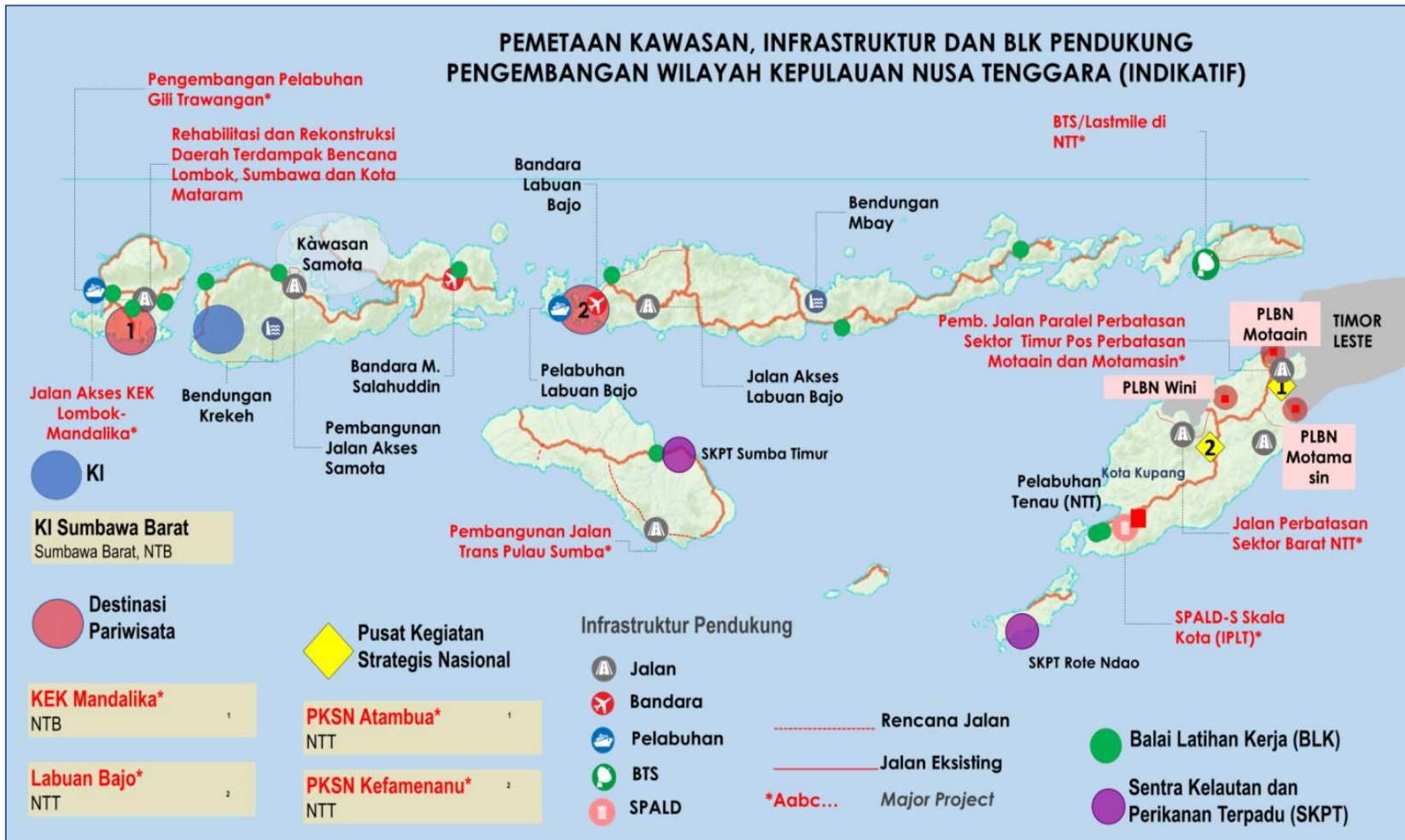
- Memperluas **investasi**, perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global melalui kerjasama internasional, seperti: Segitiga Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN.
- Menjadi **lambung energi** nasional dan lambung pangan nasional.
- Mempercepat **transformasi ekonomi** melalui:
 - ✓ Hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah
 - ✓ Mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan.
 - ✓ Pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub internasional di Kuala Tanjung).

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Jawa - Bali



- **Lumbung pangan** nasional dan sebagai pintu gerbang **destinasi wisata terbaik dunia**
- Pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi **industri 4.0**
- Pengembangan **destinasi pariwisata** berbasis alam, budaya, dan MICE.
- Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim **investasi** yang terbuka dan efisien.
- Kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan **pembangunan yang berkelanjutan**.

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara



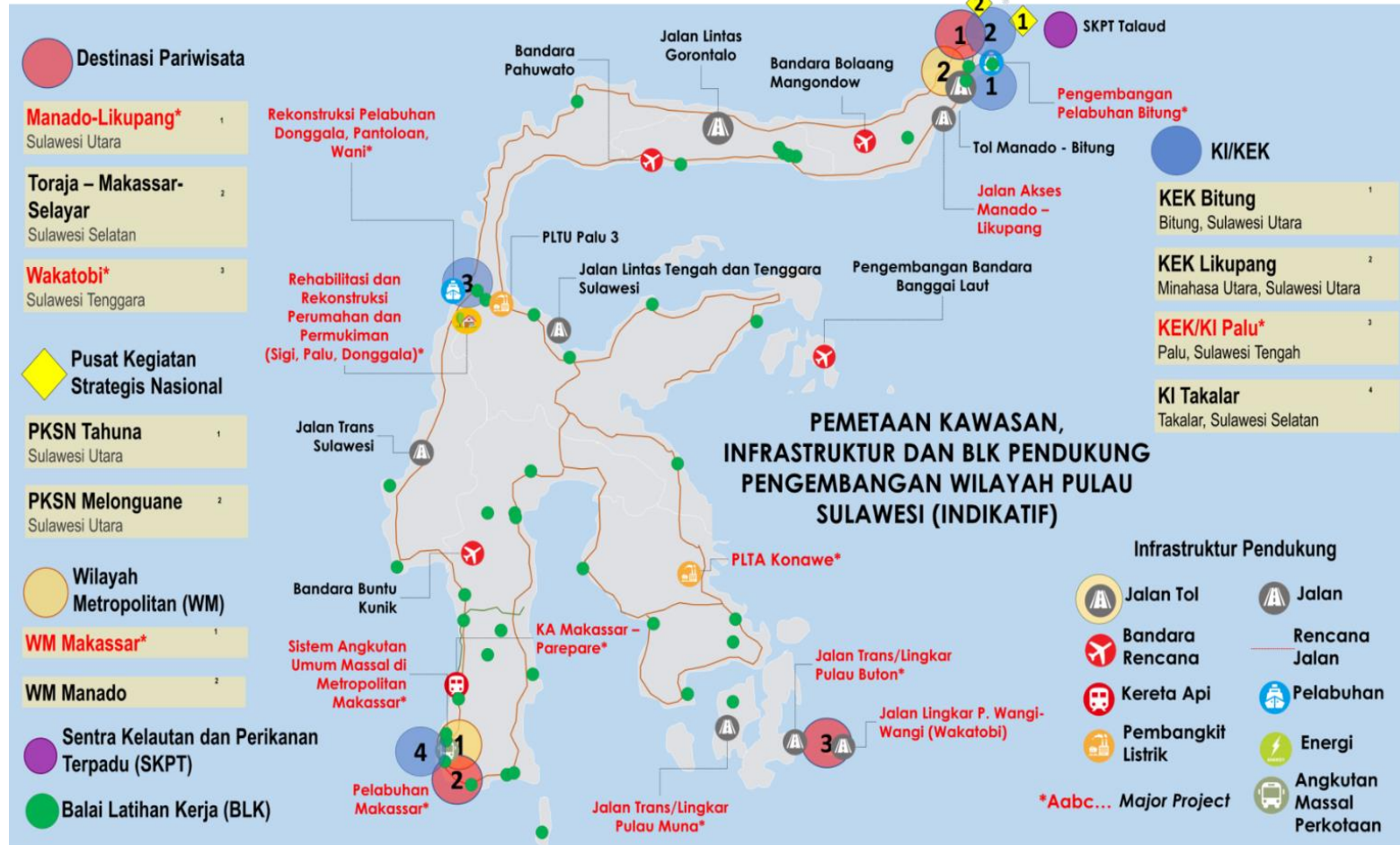
- Optimalisasi **keunggulan** wilayah dalam **perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata** yang mengutamakan pendekatan gugus pulau.
- Mendorong **transformasi perekonomian** dengan memperkuat peran sebagai **pintu gerbang pariwisata ekologis** melalui:
 - ✓ Pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*;
 - ✓ **Industri kreatif** berbasis budaya,
 - ✓ Percepatan **pembangunan perekonomian berbasis maritim** (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, rumput laut, pengembangan **peternakan sapi dan perkebunan jagung**; serta pengembangan **industri mangan dan tembaga**

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan



- Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (**Heart of Borneo**) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis
- Meningkatkan **konservasi dan rehabilitasi** DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
- Mengembangkan **pengecahan bencana alam** banjir dan kebakaran hutan.
- Mempertahankan peran sebagai **lumbung energi** nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
- Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
- **Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** di Kalimantan Timur untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan meningkatkan output sektor ekonomi non tradisional, perdagangan antarwilayah, kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

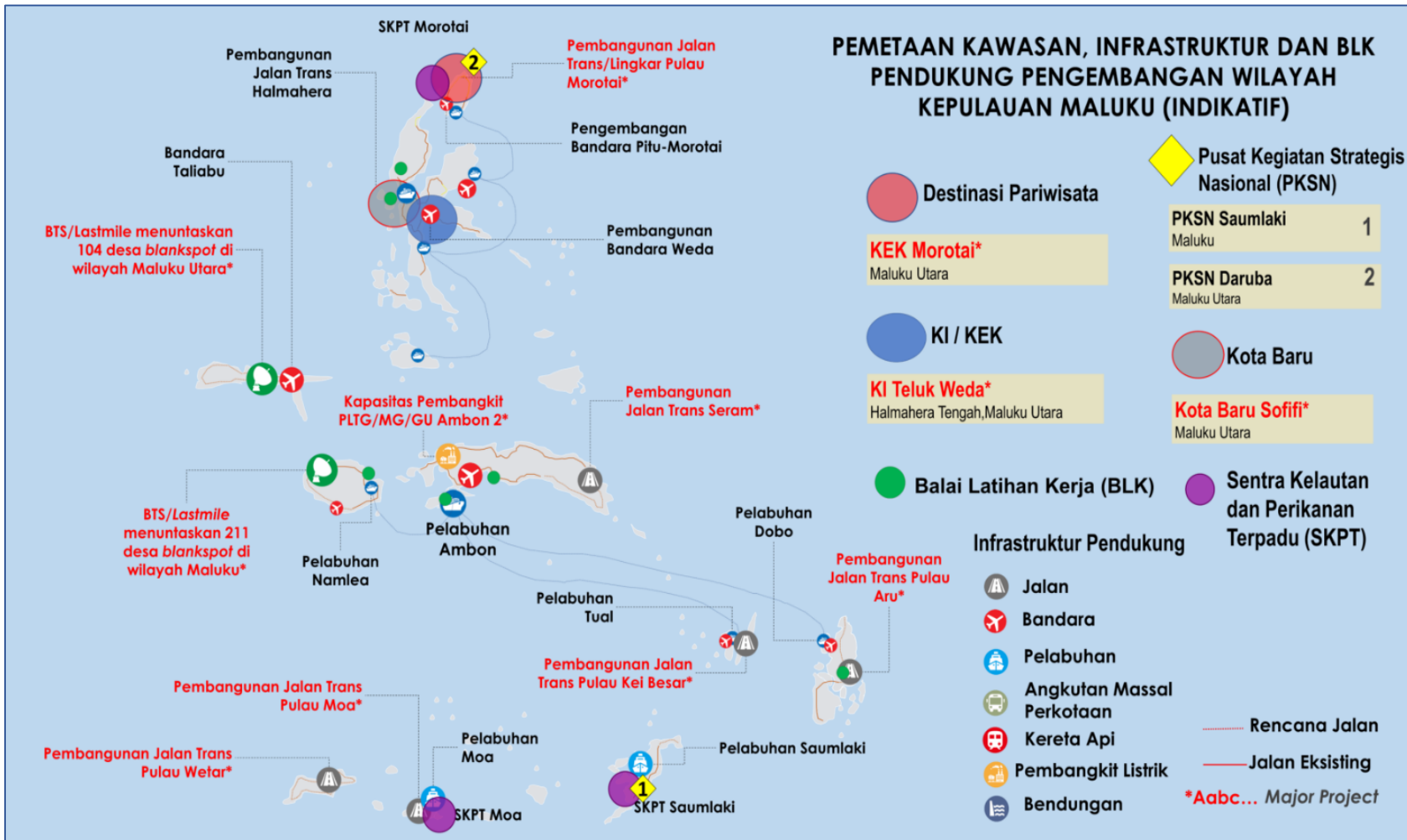
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi



- Memperkuat peran Sulawesi sebagai salah satu **pintu gerbang** Indonesia dalam **perdagangan internasional** dan pintu gerbang **Kawasan Timur Indonesia**.
- Pengembangan **industri** berbasis logistic, industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi
- **Lumbung pangan** nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung
- Percepatan **pembangunan ekonomi berbasis maritim** (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.
- Hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan tambang untuk menciptakan nilai tambah melalui **pengolahan bahan baku** menjadi setengah jadi/bahan akhir
- Pembangunan mempertimbangkan pendekatan **mitigasi dan adaptasi bencana**

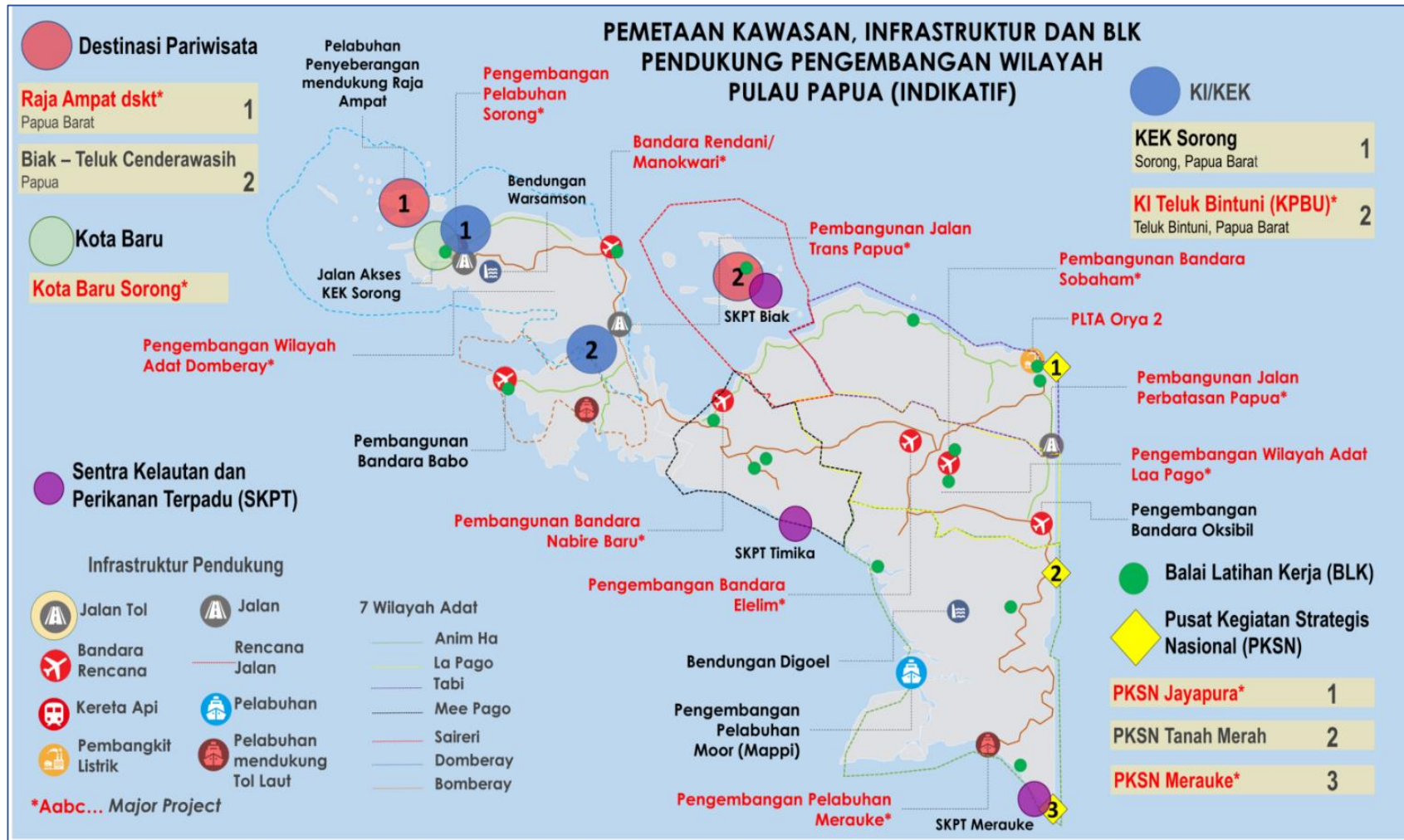
Sumber: Perpres No 18 tahun 2020, RPJMN 2020 -2024

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku



- Optimalisasi **keunggulan** wilayah sebagai **lumbung ikan nasional** dan kawasan **pariwisata** yang mengutamakan pendekatan gugus pulau
- Mendorong **transformasi ekonomi** menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui:
 - ✓ percepatan **pembangunan** perekonomian **berbasis maritim** (kelautan)
 - ✓ pengembangan **industri pengolahan** hasil perkebunan dan hasil nikel, tembaga, dan gas
 - ✓ pengembangan **pariwisata**

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Pulau Papua



- **Percepatan pembangunan** untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya melalui **transformasi ekonomi** dari berbasis SDA ke industri berbasis komoditas lokal (pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan), pengembangan ekonomi kemaritiman, pariwisata, serta hilirisasi industri pertambangan, minyak, dan gas bumi
- Pelaksanaan **Otonomi Khusus Wilayah Papua** berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan **berbasis ekologis dan wilayah adat**
- Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk **pembangunan rendah karbon**

Notes:
Nama provinsi pada peta sebelum pemekaran

Sumber: Perpres No 18 tahun 2020, RPJMN 2020 -2024

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sulawesi Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN



Mempertahankan momentum pertumbuhan yang relatif tinggi melalui **diversifikasi kegiatan ekonomi**.



Mendorong perannya sebagai salah satu **lumbung pangan nasional**.



Memantapkan perannya sebagai **hub dan pintu gerbang perdagangan internasional di kawasan timur**.



Menguatkan **mitigasi bencana dan pemulihan pascabencana**



Mendorong transformasi perekonomian wilayah menjadi **basis hilirisasi komoditas unggulan wilayah**.

STRATEGI PERTUMBUHAN

- 1 Memperkuat **pusat-pusat pertumbuhan wilayah** melalui percepatan realisasi investasi serta optimalisasi peran kawasan seperti KEK/KI Palu, KEK Bitung, KI Takalar, serta DPP Manado-Likupang/KEK Likupang, DPP Wakatobi, dan DPP Toraja-Makassar-Selayar.
- 2 Meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan **untuk mendukung pengembangan sektor industri dan pariwisata, termasuk WM Makassar dan WM Manado**.
- 3 Mempercepat **pengembangan infrastruktur penghubung antarwilayah** yang meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keterkaitan kawasan strategis dengan kawasan penyangganya, serta infrastruktur laut dan udara yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Sulawesi dengan wilayah lainnya.
- 4 Memperkuat **forum kerja sama regional Wilayah Sulawesi** serta **meningkatkan investasi** melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah.
- 5 Meningkatkan **kepastian hukum hak atas tanah** melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.
- 6 Mempercepat proses **penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR** sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

STRATEGI PEMERATAAN

- 1 Memperluas **cakupan dan kualitas pelayanan dasar**, khususnya di bidang rakyat, air minum dan sanitasi, sosial, dan trantibumlimnas. Fokus peningkatan bidang pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan input industrialisasi Wilayah Sulawesi, yaitu pendidikan menengah, pendidikan kejuruan/vokasional, dan pendidikan tinggi terapan
- 2 Meningkatkan **pengembangan produk unggulan** di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta daerah tertinggal.
- 3 Mempercepat **penyambungan jaringan transportasi pengumpan (feeder)** yang menghubungkan kota-kota kecil dan kawasan perdesaan dengan jaringan transportasi utama Trans Sulawesi.
- 4 Meningkatkan **tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa** (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyelarasan kualitas dan kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Sulawesi serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
- 5 Mengoptimalkan **fungsi dan peran GWPP** dalam rangka sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah.
- 6 Menguatkan upaya **pengurangan risiko bencana dan memantapkan pemulihan kondisi sosial ekonomi** akibat dampak bencana di berbagai wilayah di Sulawesi, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN



Mengoptimalkan **keunggulan wilayah** khususnya sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata dengan mengutamakan pendekatan gugus pulau



Mendorong transformasi perekonomian daerah dengan memperkuat peran wilayah sebagai gerbang wisata alam dan budaya melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);



Menuntaskan **pemulihan pascabencana** di Nusa Tenggara



Mendorong pengembangan **industri kreatif berbasis budaya, industri pengolahan produk pertanian, perikanan dan pertambangan**

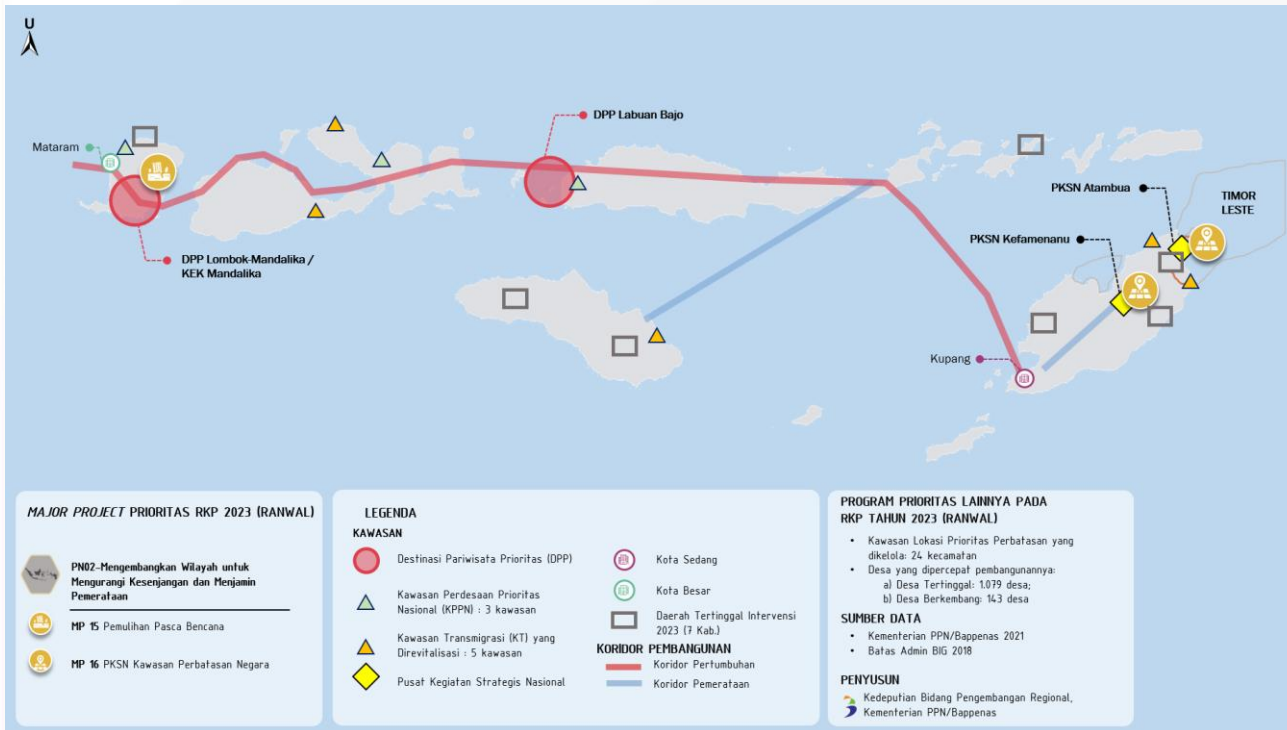
STRATEGI PERTUMBUHAN

- 1 Menyelenggarakan perhelatan internasional dalam rangka pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara khususnya DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika, DPP Labuan Bajo dan pengembangan kawasan pariwisata lainnya sesuai rencana induk (*masterplan*) yang telah disusun.
- 2 Meningkatkan pembangunan **infrastruktur konektivitas intra dan antar wilayah kepulauan** serta memperkuat koneksi transportasi dengan hub pariwisata internasional utama Bali.
- 3 Meningkatkan produktivitas usaha kelautan dan perikanan khususnya pada **SKPT Sumba Timur dan Rote Ndao, peternakan, perkebunan, pertambangan, dan budidaya tanaman pangan termasuk food estate** serta mengembangkan pusat perdagangan berbasis sektor strategis.
- 4 Mendorong pengembangan **ekonomi kreatif** bernilai tinggi.
- 5 Mengembangkan **pendidikan keterampilan & vokasi** untuk penyiapan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah.
- 6 Mendorong **pemenuhan energi melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan**.
- 7 **Meningkatkan pembangunan kawasan perkotaan pendukung sektor industri dan pariwisata** termasuk meningkatkan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan.
- 8 **Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat kerja sama antardaerah** dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui forum kerja sama regional Wilayah Nusa Tenggara.
- 9 **Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah** melalui pemberian sertifikat hak atas tanah.
- 10 Mempercepat proses **penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR** melalui pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

STRATEGI PEMERATAAN

- 1 Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, **kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar** secara simultan dengan pembangunan kota-kota kecil dan sedang.
- 2 Mengembangkan **ekonomi kawasan perbatasan** khususnya PKS N Atambua, PKS N Kefamenanu untuk memperkuat kedaulatan nasional dan memfasilitasi perdagangan lintas negara.
- 3 Menuntaskan **pemulihan sosial ekonomi dampak bencana** di Nusa Tenggara.
- 4 Meningkatkan **akses dan mutu pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan** terutama pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
- 5 Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas **penerapan SPM** khususnya pada bidang perumahan rakyat, sosial dan pekerjaan umum.
- 6 Meningkatkan **tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa** (aparatur, kelembagaan, dan keuangan) melalui penyesuaian kualitas & kuantitas ASN dengan sektor unggulan kewilayahan Nusa Tenggara serta peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
- 7 Mengoptimalkan **fungsi dan peran GWPP** dalam memperkuat sinergi kebijakan pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah

Rancangan Fokus Kegiatan dan Lokasi Prioritas Nusa Tenggara



- **Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- **Pengembangan Sektor Unggulan** difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng. Pengembangan cengkeh didorong melalui keterlibatan pihak dan sumber pendanaan non APBN
- **Pengembangan Kawasan Perkotaan** yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);
- **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi** yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN; penanganan 24 kecamatan lokpri perbatasan; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi; pengembangan 3 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang; peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023;
- **Kelembagaan dan Keuangan Daerah** yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah; peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN; penguatan GGWP; peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan; peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah; penataan dan harmonisasi regulasi; percepatan sertifikasi tanah; penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital; percepatan penyusunan dan penetapan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota; serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Maluku Tahun 2024

ARAH KEBIJAKAN



Mempercepat transformasi perekonomian wilayah melalui peningkatan **produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan** wilayah yaitu perikanan, pertambangan dan perkebunan



Memantapkan peran Wilayah Maluku sebagai **Lambung Ikan Nasional (LIN)**;



Mempercepat pengembangan **sektor pariwisata berbasis gugus pulau**



Memperkuat konektivitas **antarpulau dan intrapulau** untuk mendukung transformasi ekonomi

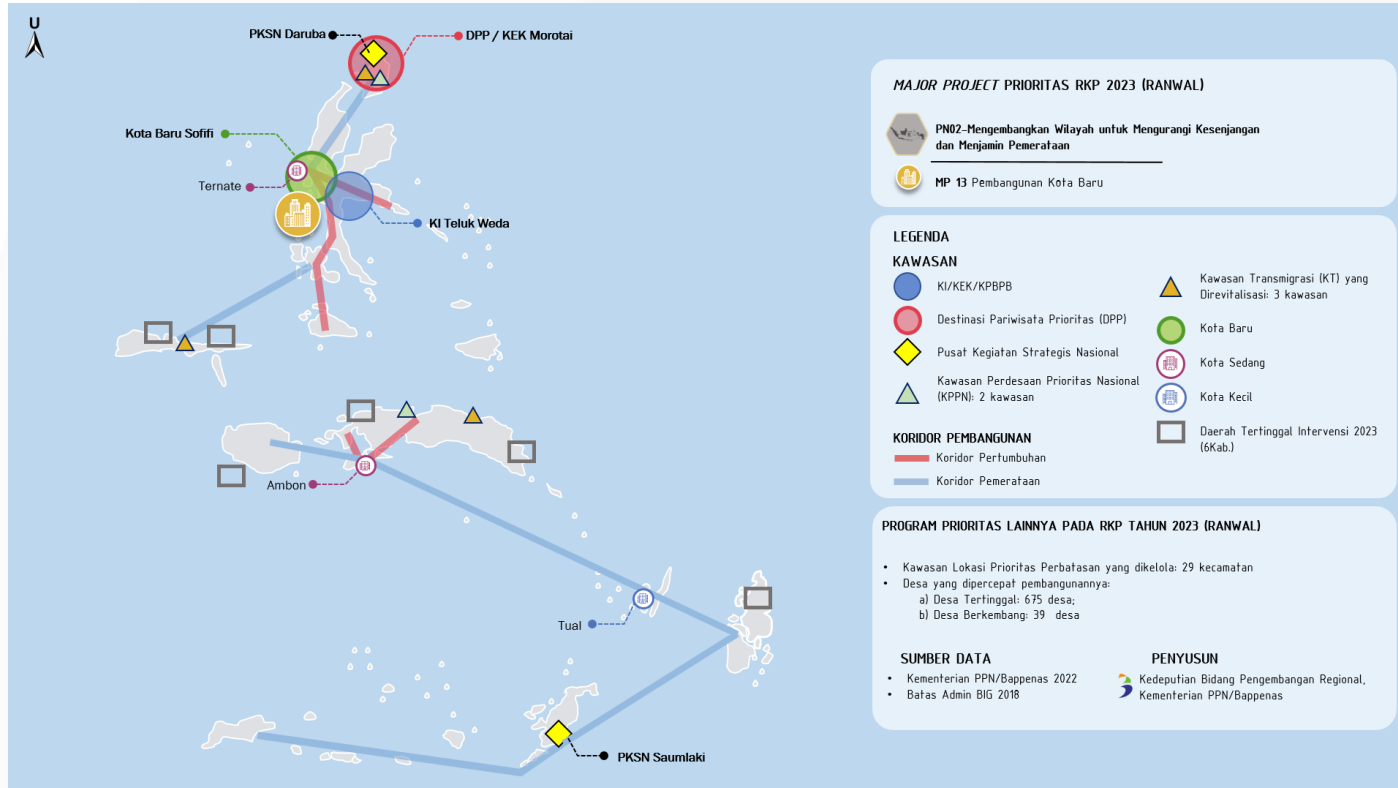
STRATEGI PERTUMBUHAN

1. Mempercepat peningkatan produksi dan investasi pada pusat-pusat industri pengolahan nikel dan bahan tambang lainnya di KI Teluk Weda dan industri pengolahan potensial lainnya.
2. Mengembangkan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah
3. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan melalui optimalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, SKPT Saumlaki, SKPT Morotai dan pembangunan Pelabuhan Ambon Baru yang terintegrasi dengan pelabuhan perikanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
4. Mengembangkan pusat ekonomi berbasis komoditas unggulan kelapa, pala, dan cengkeh dengan berfokus pada peningkatan produksi dan produktivitas.
5. Mempercepat pengembangan kawasan pariwisata unggulan wilayah khususnya DPP/KEK Morotai sesuai rencana induk (*masterplan*) kawasan pariwisata yang telah disusun, dan pengembangan kawasan pariwisata potensial lainnya.
6. Mempercepat pembangunan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah
7. Mengembangkan simpul transportasi dan aksesibilitasnya dalam menghubungkan pusat pertumbuhan wilayah
8. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama, pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi di daerah, serta penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah regional Wilayah Maluku.
9. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah.
10. Mempercepat proses penyusunan dan penetapan RTRW maupun RDTR melalui pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah

STRATEGI PEMERATAAN

1. Mempercepat pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang dilakukan simultan dengan meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.
2. Memperkuat konektivitas antarpulau dan intrapulau khususnya dengan meningkatkan prasarana dan sarana penyeberangan antarpulau dan jalan lingkar pulau.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan.
4. Memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas penerapan SPM khususnya pada bidang sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum.
5. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur, dan keuangan daerah) khususnya dalam hal kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel.
6. Mengoptimalkan fungsi dan peran GWPP dalam rangka sinergi pusat-daerah, peningkatan daya saing, dan inovasi daerah serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam mengelola keuangan daerah dan dana desa

Rancangan Fokus Kegiatan dan Lokasi Prioritas Maluku



- **Pengembangan Kawasan Strategis** yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- **Pengembangan Sektor Unggulan** akan difokuskan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap melalui pemberian bantuan sarana pengembangan usaha nelayan, dan perikanan budidaya melalui pemberian benih ikan air laut yang akan disalurkan ke masyarakat
- **Pengembangan Kawasan Perkotaan** yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);
- **Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi** yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKS N, 29 kecamatan lokpri perbatasan; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi pengembangan 2 KPPN; 675 desa tertinggal; peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023
- **Kelembagaan dan Keuangan Daerah** yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah, kompetensi SDM ASN, penguatan GGWP, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar